RENJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TAHUN 2021

SIAP BOSS
Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis Online Single Submission
Simple Izinnya
Safe Investasinya

RAJIN PTSP
GERAI PERIJINAN

dpmptsp

KAB. PINRANG

TA. 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ,..... 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan. 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP (DPMPTSP)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas PMPTSP 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PINRANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP 33
3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting 52
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 52
5.3 Rencana Tindak Lanjut 53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Tahun 2021, disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan publik,Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pinrang, Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024,Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Pinrang.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra DPMPTSP Tahun 2019 – 2024 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang. Renja DPMPTSP memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pinrang dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target pencapaian Kerja, pengorganisasian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Pelayanan merupakan salah satu bentuk wujud dari upaya pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan penerapan pelayanan prima yang efektif , efesien dan berbasis elektronik sehingga pelayanan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pembangunan dan menggerakan perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta dibarengi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus naik serta meningkatnya permintaan ruang membuat masyarakat di Kabupaten Pinrang sangat butuh pelayanan yang mudah,cepat dan transparan yang tidak membutuhkan banyak birokrasi yang berbelit-belit. Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah

Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan efektif sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Menjawab kebutuhan masyarakat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang membentuk Kantor Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (KP3KP) merupakan pusat kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan. Pusat Pelayanan Publik meliputi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Usaha serta Pelayanan Perizinan Penanaman Modal,. Sehingga dengan terbentuknya KP3KP dapat memudahkan masyarakat umum dan para investor untuk memenuhi kebutuhannya.Kantor P3KP berada dalam satu atap dengan menerapkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2021 landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penanggaran pembangunan nasional;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 – 2019 ;
26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

28) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
29) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
30) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 12);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8);

34) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pinrang.

35) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita daerah kabupaten Pinrang Nomor 27 tahun 2020);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2021 dimaksudkan untuk :

- Sebagai dasar/pijakan dan rujukan dalam menyusun RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
- Dokumen Renja-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2020 harus bersinergis dengan RPJP Kabupaten Pinrang 2019-2029, RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024, RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 dan RKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2021;
- Sebagai suatu dokumen perencanaan untuk referensi penilaian tahunan terhadap hasil capaian Kerja tahun sebelumnya.
- Menyiapkan kerangka evaluasi Kerja bagi DPMPTSP Kabupaten Pinrang
- Renja DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2021 bertujuan untuk membangun konsistensi perencanaan dalam perwujudan capaian Kerja Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Menjelaskan secara ringkas latar belakang perlunya penyusunan Renja-SKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Renstra DInas PMPTSP tahun lalu, menganalisis kinerja perangkat

Dinas PMPTSP, menjelaskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP serta mereview rancangan awal RKPD Dinas PMPTSP serta menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

BAB III menelaah kebijakan nasional yang terkait Dinas PMPTSP memuat tujuan dan sasaran Renja yang akan dicapai serta program dan kegiatan prioritas Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang pada tahun 2021

BAB IV membuat uraian dan tabel rencana kerja serta pendanaan di Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang

BAB V Penutup yang menjelaskan tentang catatan penting dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2021

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas PMPTSP

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu

Dalam evaluasi pelaksanaan pencapaian Renja tahun lalu diuraikan pada penjelasan dibawah ini tetapi dalam kajian (review) pencapaian renja tahun n-1 perbandinganya baru pada tahap triwulan kedua tahun 2020, adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan capaian realisasi tahun n-2 (Tahun 2019) adalah 98% sedangkan perkiraan capaian pada tahun n-1 (tahun 2020) hanya 13% terdapat selisih 85%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 8 kegiatan capaiam realisasi tahun n-2 (tahun 2019) adalah 100% sedangkan tahun n-1 (tahun 2020) hanya mencapai 1% terdapat selisih 99%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 4 kegiatan capaian realisasi tahun-2 (tahun 2019) adalah 89 % sedangkan tahun n-1 (tahun 2020) belum terealisasi atau 0%
4. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan capaian realisasi tahun n-2 (tahun 2019) adalah 93 % sedangkan tahun n-1 (tahun 2020) hanya 13% terdapat selisih 80%
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang terdiri dari 5 kegiatan capaian realisasi tahun n-2 (tahun 2019) adalah 93 % sedangkan perkiraan capaian pada tahun n-1 (tahun 2020) hanya 6% terdapat selisih 87%
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi yang terdiri dari 5 kegiatan capaian realisasi tahun n-2 (tahun 2019) adalah 96 % sedangkan perkiraan capaian pada tahun n-1 (tahun 2020) hanya 5% terdapat selisih 91%

7. Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat yang terdiri dari 1 kegiatan tidak terealisasi karena pada rencana kerja tahun n-2 (tahun 2019) dan tahun n-1 (tahun 2020) kegiatan tersebut tidak dianggarkan.
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan yang terdiri dari 3 kegiatan capaian realisasi tahun n-2 (tahun 2019) mencapai 98% sedangkan perkiraan capaian pada tahun n-1(tahun 2020) hanya 22% terdapat selisih 76%.

Pada uraian kajian Renja tahun 2020 yang terdiri dari 8 program dan 33 kegiatan dan kajian Renja tahun 2019 yang terdiri dari 8 program dan 32 kegiatan semuanya tidak memenuhi target yang direncanakan karena faktor :

1. Target Kinerja Capaian Program Renstra perangkat daerah tahun 2020 nilainya lebih besar daripada tingkat capaian realisasi target Renstra (%) tahun 2020.
2. Target Renstra lebih besar darpada anggaran APBD perangkat daerah yang direncanakan
3. Perubahan kebijakan dan aturan pemerintah pusat dan provinsi sering terjadi karena kurangnya evaluasi dan monitoring dari pemerintah Pusat terkait pemerintah daerah.
4. Terbatasnya plafond anggaran APBD yang diberikan sehingga pencapaian target Renstra yang direncanakan persentasenya sangat jauh perbandingannya.
5. Realisasi anggaran pada triwulan kedua masih sangat sedikit dikarenakan adanya perubahan anggaran pada tahun 2020 terkait wabah Covid 19
6. Perubahan anggaran dkurangi sampai 50% dari anggaran pokok akibat wabah Covid 19 yaitu anggaran pokok Rp.2.500.000.000 menjadi Rp.1.250.000.000

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan untuk mencapai tujuan,sasaran ,strategi dan kebijakan harus selalu selaras dan seimbang yang tetap berlandaskan aturan yang berlaku. Dan dalam pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah harus dilakukan pengawasan,

evaluasi dan monitoring terhadap kinerja yang telah dilaksanakan sehingga antara rencana dan realisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang direncanakan.

Penyelenggraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,akuntabel,partisipatif serta adanya kepastian hukum yang efektif dan efesien . Dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintah tersebut hal-hal yang dapat dilakukan adalah memonitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan, perbaikan pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP), peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDM) melalui Bimbingan Teknis serta peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel T-C.29.

Rekpitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020

Provinsi Sulewesi Selatan / Kabupaten Pinrang

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1							2	3	4		5		6		7		9=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							URUSAN RUTIN SKPD																	
1	16	1	16	01	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**978.250.000**		**849.925.322**		**771.670.000**		**752.769.824**		**98%**		**840.347.000**		**107.988.000**		**11%**
1	16	1	16	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening, layanan telepon, listrik yang terbayarkan tepat waktu	4 Item	44.000.000	12 bln	22.695.850,00	12 bln	32.240.000	3 rekening	26.189.624,00	3 rekening	81%	12 Bulan	35.380.000	12 Bulan	4.458.000	12 Bulan	**10%**
1	16	1	16	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah surat tanda nomor (STNK) untuk kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	3 STNK	4.250.000	12 bln	1.802.100,00	3 Unit	2.250.000	3 STNK	2.250.000,00	3 STNK	100%	3 STNK	2.250.000	3 STNK	0	3 STNK	**0%**
1	16	1	16	01	01	07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	141.000.000	3 dok	86.246.000,00	3 dok	133.340.000	16 Jasa	133.295.000,00	16 Jasa	100%	16 Jasa	132.812.000	2 Jasa	36.600.000	2 Jasa	**26%**
1	16	1	16	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	2 Orang	26.000.000	12 bln	16.909.000,00	2 Keg	18.199.000	3 orang	18.199.000,00	3 orang	100%	2 Orang	18.199.000	2 Orang	4.000.000	2 Orang	**15%**
1	16	1	16	01	01	12	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Paket	13.000.000	1 Paket	7.990.000,00	-	-	-	-	-	-	1 Paket	5.000.000	Paket	0	Paket	**0%**
1	16	1	16	01	01	13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	16 Jenis	26.000.000	3 item	19.000.000,00	3 item	15.150.000	2 Alat	15.130.000,00	2 Alat	100%	2 Alat	16.500.000	1 Alat	2.000.000	1 Alat	**8%**
1	16	1	16	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang teralaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	62 Kali	300.000.000	12 bulan	329.264.372,00	-	190.000.000	50 Kali	189.994.400,00	50 Kali	100%	50 Kali	217.520.000	Kali	0	Kali	**0%**
1	16	1	16	01	01	19	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK, penggandaan/fotocopy, makan minum harian pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	5 Item	401.000.000	5 paket	356.718.000,00	12 bln	362.791.000	5 rekening	350.011.800,00	5 rekening	96%	5 Item	392.586.000	1 Item	57.330.000	1 Item	**14%**
1	16	1	16	01	01	20	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah Jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Orang	23.000.000	12 bln	9.300.000,00	12 bln	17.700.000	2 orang	17.700.000,00	2 orang	100%	2 Orang	20.100.000	3 Orang	3.600.000	3 Orang	**16%**

1	16	1	16	01	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi**	**100%**	**560.000.000**		**410.159.331**		**425.900.500**		**424.909.999**		**100%**		**416.750.000**		**3.789.000**		**1%**
1	16	1	16	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	3 Unit	35.000.000	2 item	29.500.000,00	2 item	92.500.000	2 Item	92.340.000,00	2 Item	100%	2 Item	27.300.000	Item	0	Item	**0%**
1	16	1	16	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	3 Unit	155.000.000	6 unit	45.000.000,00	6 item	141.500.000	6 Item	141.466.820,00	6 Item	100%	3 Jenis	40.000.000	Jenis	0	Jenis	**0%**
1	16	1	16	01	02	10	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubleeur kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	5 Jenis	83.000.000	5 item	92.587.000,00	3 item	45.200.000	3 Item	45.050.000,00	3 Item	100%	5 Jenis	75.250.000	Jenis	0	Jenis	**0%**
1	16	1	16	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	1 Paket	100.000.000	3 paket	127.300.000,00	1 Paket	30.000.000	1 Paket	29.860.000,00	1 Paket	100%	3 Paket	60.000.000	Paket	0	Paket	**0%**
1	16	1	16	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah suku cadang kendaraan dinas yang diganti sesuai analisa kebutuhan	5 Kend. Dinas	54.000.000	12 bln	49.067.331,00	4 item	39.700.000	4 Item	39.413.179,00	4 Item	99%	3 Kend. Dinas	30.200.000	2 Kend. Dinas	3.789.000	2 Kend. Dinas	**7%**
1	16	1	16	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	14 Unit	8.000.000	12 unit	2.400.000,00	12 Unt	2.200.000	12 Unit	2.200.000,00	12 Unit	100%	12 Unit	4.000.000	Unit	0	Unit	**0%**
1	16	1	16	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	14 Unit	25.000.000	10 unit	4.715.000,00	10 Unit	4.800.000	10 Unit	4.680.000,00	10 Unit	98%	2 Item	10.000.000	Item	0	Item	**0%**
1	16	1	16	01	02	42	Rahabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Gedung	100.000.000	1 paket	59.590.000,00	1 Paket	70.000.500	1 Paket	69.900.000,00	1 Paket	100%	1 Gedung	170.000.000	Gedung	0	Gedung	**0%**
1	16	1	16	01	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**	**100%**	**53.550.000**		**45.409.000**		**52.749.000**		**46.922.000**		**89%**		**33.225.000**		**0**		**0%**
1	16	1	16	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 Dokumen	3.950.000	2 laporan	5.025.000,00	1 Lap	3.360.000	1 laporan	3.360.000,00	1 laporan	100%	2 Dokumen	3.360.000	Dokumen	0	Dokumen	**0%**
1	16	1	16	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan	3.400.000	2 laporan	1.330.000,00	2 Lap	1.855.000	2 laporan	1.855.000,00	2 laporan	100%	2 Laporan	2.035.000	Laporan	0	Laporan	**0%**
1	16	1	16	01	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan	6.200.000	1 laporan	9.980.000,00	1 Lap	5.608.000	1 laporan	5.608.000,00	1 laporan	100%	1 Laporan	5.608.000	Laporan	0	Laporan	**0%**
1	16	1	16	01	06	06	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	40.000.000	3 laporan	29.074.000,00	3 Dok	41.926.000	3 laporan	36.099.000,00	3 laporan	86%	3 Dokumen	22.222.000	Dokumen	0	Dokumen	**0%**

1	16	1	16	01	08		**Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase sumber daya aparatur yang tercapai nilai SKP baik**	**100%**		**274.000.000**			**267.435.623**			**244.000.000**			**227.753.148**			**93%**			**136.000.000**			**18.000.000**			**7%**
1	16	1	16	01	08	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	125	Pasang	44.000.000	60	pasang	48.000.000,00	60	pasang	36.000.000	60	pasang	36.000.000,00	60	pasang	100%	120	Pasang	36.000.000	60	Pasang	18.000.000	60	Pasang	**41%**
1	16	1	16	01	08	08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sumber daya manusia aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	24	Orang	230.000.000	12	bulan	219.435.623	25	Orang	208.000.000	25	Orang	191.753.148,00	25	Orang	92%	25	Orang	100.000.000		Orang	0		Orang	**0%**
1	16	1	16	01	15		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Jumlah Investor PMDN dan PMA**	**100%**		**198.000.000**			**205.204.515**			**234.776.000**			**218.889.200,00**			**93%**			**156.309.500**			**10.265.000**			**5%**
1	16	1	16	01	15	02	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah informasi investasi penanaman modal	5	Kegiatan	29.000.000			-	12	Kec	37.000.000	12	kecamatan	37.000.000,00	12	kecamatan	100%	150	Buku	17.000.000		Buku	0		Buku	**0%**
1	16	1	16	01	15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah realisasi laporan LKPM, PMDN, dan PMA	2	Laporan	90.000.000	3	kegiatan	54.850.000,00	6	Pek	102.150.000	6	Pekerjaan	101.990.000,00	6	Pekerjaan	100%	2	Laporan	69.245.000	1	Laporan	905.000	1	Laporan	**1%**
1	16	1	16	01	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi dalam provinsi dan luar provinsi	4	Pameran	66.000.000	2	Mou	142.704.515,00	2	Kali	77.316.000	2	Pameran	66.964.200,00	2	Pameran	87%	4	Pameran	58.000.000	1	Pameran	8.000.000	1	Pameran	**12%**
		1	16	01	15	12	Penyusunan Buku Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Buku Rancangan Umum Penanaman Modal				150	Buku	7.650.000,00		-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	**-**
1	16	1	16	01	15	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tim satgas.	1	Laporan	13.000.000			-	1	Keg	18.310.000	1	Kegiatan	12.935.000,00	1	Kegiatan	71%	2	Laporan	12.064.500	1	Laporan	1.360.000	1	Laporan	**10%**
1	16	1	16	01	16		**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi**	**Nilai investasi PMDN dan PMA**	**100%**		**622.000.000**			**245.170.700**			**425.775.000**			**406.841.019,00**			**96%**			**456.558.500**			**24.326.000**			**4%**
1	16	1	16	01	16	02	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di bidang Investasi	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	3	Kegiatan	300.000.000			-	2	Keg	157.000.000	2	kegiatan	144.164.200,00	2	kegiatan	92%	1	Kegiatan	198.054.000	-		0	-		**0%**
1	16	1	16	01	16	04	Pengembangan sistem informasi dan penanaman modal	Jumlah penggunaan aplikasi SIP dan pengembangan website DPMPTSP	3	Kegiatan	210.000.000	3	kegiatan	127.390.000,00	2	Pek	161.000.000	2	Pekerjaan	160.825.319,00	2	Pekerjaan	100%	2	Paket	193.000.000	1	Paket	1.666.000	1	Paket	**1%**
		1	16	01	16	05	Penyusunan Sistem Informasi dan Penanaman Modal di daerah	Jumlah Laporan Penerbitan Perizinan	12	Laporan	33.000.000	12	bulan	11.445.000,00		-	-			-			-		-	-		-	-		-	**-**

1	16	1	16	01	16	07	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah layanan pengaduan dan layanan perizinan ke masyarakat	1	Paket	59.000.000	1	paket	106.335.700,00	6	Keg	91.950.000	6	kegiatan	86.201.500,00	6	kegiatan	94%	1	Paket	49.704.500	1	Paket	19.800.000	1	Paket	**34%**
1	16	1	16	01	16	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan perizinan dan non perizinan	12	Laporan	20.000.000			-	12	lap	15.825.000	12	Laporan	15.650.000,00	12	Laporan	99%	12	Laporan	15.800.000	3	Laporan	2.860.000	3	Laporan	**14%**
1	20	1	16	01	42		**Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat**	**Jumlah persentase wirausaha yang memanfaatkan layanan perizinan**	**100%**		**47.500.000**			**0**			**0**			**0,00**			**0**			**45.520.000**			**0**			**0%**
1	20	1	16	01	42	01	Sosialisasi Perizinan dan Layanan Masyarakat	Jumlah informasi layanan perizinan melalui media elektronik dan brosur	3	Kegiatan	47.500.000		-	-		-	-		-	-		-	-	3	Kegiatan	45.520.000			0			**0%**
1	20	1	16	01	43		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan**	**Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standart pelayanan (SP)**	**100%**		**525.200.000**			**393.862.000**			**520.130.000**			**512.255.000,00**			**98%**			**415.290.000**			**91.935.000**			**18%**
1	20	1	16	01	43	01	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah bimtek PTSP, service excelence, in house training, dan sosialisasi layanan masyarakat	5	Kegiatan	202.000.000	3	keg	121.567.000,00	3	keg	86.450.000	3	keg	82.650.000,00	3	keg	96%	3	Kegiatan	102.000.000	1	Kegiatan	770.000	1	Kegiatan	**0%**
1	20	1	16	01	43	02	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Jumlah laporan kearsipan	12	Laporan	30.200.000	2	laporan	13.110.000,00	2	laporan	22.430.000	2	laporan	22.075.000,00	2	laporan	98%	12	Laporan	20.430.000	2	Laporan	3.515.000	2	Laporan	**12%**
1	20	1	16	01	43	03	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah laporan layanan jemput bola, one day service	4	Laporan	293.000.000	12	bulan	259.185.000,00	12	bulan	411.250.000	12	bulan	407.530.000,00	12	bulan	99%	4	Kegiatan	292.860.000	2	Kegiatan	87.650.000	2	Kegiatan	**30%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam peningkatan daya saing nasional melalui implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara Nasional.

DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pengusaha regional, nasional, dan internasional serta upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, DPMPTSP Kabupaten Pinrang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang penanaman modal serta perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Pinrang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Provinsi Sulewesi Selatan Kabupaten Pinrang

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		Nilai Investasi PMDN	957	1100	1504	1920	488				
			Nilai Investasi PMA	2	3	3	3	1		3	3	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)		Nilai Investasi PMDN	Rp1.020.259.289.310	Rp 1.080.259.423.000	Rp 1.105.632.540.000	Rp 1.325.006.000.000	Rp 1.729.696.956.068		Rp 1.105.632.540.000	Rp1.325.006.000.000	
			Nilai Investasi PMA	$ 39.411.395,18	$ 45.632.000	$ 54.230.040	$ 58.922.300	$ 88.264.650		$ 54.230.040	$ 58.922.300	
3	Rasio daya serap tenaga kerja		Jumlah tenaga kerja lokal	2681	-	-	-	1560	-	-	-	
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		Realisasi PMDN	Rp1.020.259.289.310	Rp 1.080.259.423.000	Rp 1.105.632.540.000	Rp 1.325.006.000.000	Rp 1.729.696.956.068		Rp 1.105.632.540.000	Rp1.325.006.000.000	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan isu strategis daerah Kabupaten Pinrang terkait Investasi dan pelayanan public adalah Implementasi e –Government dalam rangka peningkatan layanan public dan pemenuhan pelayanan dasar hal ini terkait pada penjabaran Misi pertama dan keempat RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 dan keterkaitannya dengan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 yaitu Misi Pertama "**Memantapkan system birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.** Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan system birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic govermance (e-govermance) dan Misi Kedua **"Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.** Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi yang atraktif, penanganan penyandang masalah kesejahteraan social, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat. pencapaiannya melalui indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang yaitu mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal. merumuskan kebijakan penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, sehingga pendekatan ini menjadi langkah-langkah harmonisasi kebijakan pelayanan dengan penerapan "**Paket Kebijakan Investasi"** (PAKSI) sebagai upaya pemberian kemudahan bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang dan aplikasi **"SIAP BOSS"** (Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan berbasis OSS) serta aplikasi **"RAJIN"** (Gerai Perizinan di Tingkat Kecamatan,Kelurahan dan Desa) dan

Peningkatan Nilai Investasi dengan memberikan kemudahan,fasilitasi dan kerjasama dibidang investasi melalui **FIP (Forum Investasi Pinrang).** Pengurusan dan pendaftaran izin sudah dapat diakses melalui jaringan internet dengan menggunakan aplikasi **SIAP BOSS** serta layanan yang langsung menyentuh masyarakarat yaitu **RAJIN** melalui kegiatan Mobile Service (Mobil Pelayanan Keliling) di 12 Kecamatan dan One Day service, sehingga tingkat kemudahan pelayanan perizinan semakin dekat ke pengguna layanan.

Terkait Misi pertama dan kedua tersebut diatas permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Adanya kebijakan pemerintah pusat berupa pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau yang biasa dekenal dengan Online Single Submission (OSS), yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan yang tidak stabil),belum sinkronnya NSPK diantara kementerian / lembaga / pemerintah daerah, kurangnya pendampingan/bimbingan dari kementerian/lembaga teknis kepada pemerintah kabupaten/kota, serta masih adanya proses penyempurnaan pada aplikasi OSS sendiri, yang menyebabkan pelayanan perizinan berusaha di daerah sangat terpengaruh. Penerapan sistem OSS (Online Single Submission) oleh pemerintah pusat yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan) yang belum stabil serta sarana prasarana penunjang system tersebut masih kurang memadai sehingga sangat menghambat dalam proses penerbitan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan, Penyesuaian aplikasi yang baru dalam proses penerbitan perizinan masih terus dilakukan dengan mengkondisikan sarana dan prasana yang tersedia dan sumber daya manusia yang ada . Terbatasnya data dan Informasi potensi unggulan untuk pendukung kegiatan FIP, masih kurangnya minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang, Kurangnya promosi terkait potensi unggulan pertanian,perikanan dan parawisata di Kabupaten Pinrang.

Dampak yang terjadi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah peningkatan layanan perizinan yaitu melakukan sinkronisasi aplikasi OSS

dengan Aplikasi SILEMPUE, yang didukung oleh Aplikasi **Tracking System** yaitu aplikasi yang terintegrasi mulai dari front office, back office hingga terbitnya izin melalui sistem jaringan, aplikasi **SMS Gateway** adalah layanan aplikasi yang secara langsung menyampaikan SMS ke Handphone yang berbasis android kepada pemohon bahwa posisi izinnya sudah diproses, **Aplikasi Digital Files** adalah aplikasi yang memudahkan dalam proses pengarsipan izin. ***Mobile Service*** (Mobil Keliling) merupakan kegiatan pelayanan perizinan yang mengunakan mobil perizinan keliling pada tempat-tempat yang strategis.

Keberadaan DPMPTSP merupakan suatu kemajuan besar kebijakan daerah di bidang penanaman modal, dimana tidak ada lagi resistensi antara SKPD teknis dan lebih efektif menjalankan kebijakan di bidang penanaman modal serta adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Kepala Dinas PMPTSP terkait penerbitan izin. Lahir pula berbagai Peraturan Daerah terkait Pajak dan retribusi daerah meliputi Pajak reklame, pajak hotel dan restoran, retribusi Izin Gangguan, retribusi IMB, retribusi Izin Usaha Perikanan, dan retribusi izin trayek serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal daerah yang mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan di bidang penanaman modal serta pemberian insentif dan kemudahan daerah. Adapun capaian realisasi PMD dan PMA pada tahun 2018-2019 nilai rata-ratanya 170% dan Penanaman Modal Asing capaiannya pada tahun 2018-2019 nilai rata-ratanya 142 %, dan meningkatnya investor/proyek PMDN pada tahun 108-2019 nilai rata-rata capaiannya adalah 108% dan PMA capaiannya pada tahun 2018-2019 nilai rata-ratanya 117% .sera meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usahanya dengan membuat dan mengurus sendiri izinnya tanpa melalui CALO.

Tantangan yang akan dihadapi kedepan adalah makin meningkatnya persaingan global dan makin heterogennya masyarakat Pinrang dalam perkembangan yang terjadi saat ini sehingga Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang harus mampu menjawab tantangan perkembangan ini dengan peningkatan layanan dan peningkatan realisasi investasi dengan memberikan

kemudahan,fasilitasi dan kerjasama dibidang investasi melalui program dan kegiatan serta inovasi yang berpihak kepada masyarakat usaha dan investor PMDN dan PMA. Adapun kegiatan dan inovasi yang dilakukan adalah Inovasi **"SIAP BOSS"** adalah Sistem Informasi dan aplikasi Perizinan berbasisi OSS, ,**Forum Investasi Pinrang (FIP)** merupakan forum di tingkat pusat dalam rangka menarik minat investor.Inovasi **"RAJIN" (Gerai Perizinan)** adalah peningkatan layanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan,Kelurahan dan Desa serta peningkatan pemenuhan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang layanan perizinan berbasis online terkait dengan pelaksanaan e- integrasi system pelayanan perizinan Penanaman Modal,

Pelayanan perizinan usaha,perizinan non usaha dan perizinan penanaman modal secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pinrang. Sehinggga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat,mudah dan transparan. Strategis dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pengembangan /UpGarding Aplikasi SIAP BOSS, dibentuknya Satgas Percepatan realisasi LKPM yang melibatkan semua bidang di Dinas PMPTSP dan lintas SKPD, lanjutan pelaksanaan forum Investasi bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten,Penyederhanaan regulasi investasi penanaman modal, peningkatan kompetensi melalui Diklat/pelatihan yang mengacu pada aktivitas unit layanana per bidang, kegiatan monitoring dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang direncanakan merupakan rancangan yang sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dan telah dikondisikan dengan laporan evaluasi dan monitoring tahun sebelumnya atau n-1 yaitu terdiri dari 6 (enam) Program dengan 10 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.062.200.000 (Enam Milyar Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan pada rancangan akhir RKPD terdiri dari 6 program, 10 kegiatan dan 44 Sub kegiatan, penambahan 1 Sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dan total anggaran pada RKPD akhir adalah Rp.5.235.966.807 (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah). Adanya perbedaan anggaran antara RKPD awal dan RKPD akhir karena pada perencanaan pada rancangan awal RKPD belum ditentukan estimasi plafond anggaran sedangkan pada rancangan akhir RKPD sudah ditentukan estimasi plafond anggaran sehingga pada perencanaan rancangan akhir RKPD merupakan anggaran skala prioritas yang direncanakan. Uraian tersebut dapat dilihat pada table T-C.31 dibawah ini.

Tabel T_C. 31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Provinsi Sulewesi Selatan Kabupaten Pinrang

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**6.062.200.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.235.966.807**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**1.885.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**945.858.000**	
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**300.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**184.800.000**	
	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang Investasi**	**3 Investor**	**250.000.000**	**a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang Investasi**	**3 Investor**	**184.800.000**	
	1. Penetapan Kebijakan Daerah MengenaiPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				250.000.000	1. Penetapan Kebijakan Daerah MengenaiPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				184.800.000	
	b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Tersedianya peta potensi unggulan daerah**	**1 peta**	**50.000.000**	**b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Tersedianya peta potensi unggulan daerah**	**1 peta**	**-**	
	1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				50.000.000	1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				-	
2	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**80.000.000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**144.478.000**	
	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Terselenggaranya Pameran Investasi**	**4 Pameran**	**80.000.000**	**a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Terselenggaranya Pameran Investasi**	**4 Pameran**	**144.478.000**	
	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				20.000.000	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				17.000.000	
	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				127.478.000	

3	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**620.000.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**521.000.000**	
	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah informasi layanan perizinan**	**3 Informasi Layanan**	**620.000.000**	**a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah informasi layanan perizinan**	**3 Informasi Layanan**	**521.000.000**	
	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				200.000.000	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				140.000.000	
	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal				105.000.000	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal				102.000.000	
	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan PengelolaanPengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan				15.000.000	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan PengelolaanPengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan				12.000.000	
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				300.000.000	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				267.000.000	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**135.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**86.560.000**	
	a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah Laporan SKM dan LKPM**	**2 Laporan**	**135.000.000**	**a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah Laporan SKM dan LKPM**	**2 Laporan**	**86.560.000**	
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman				50.000.000	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman				37.960.000	
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				70.000.000	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				40.100.000	
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				15.000.000	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				8.500.000	

5	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**750.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**9.020.000**	
	a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah aplikasi berbasis IT**	**2 Aplikasi**	**750.000.000**	**a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah aplikasi berbasis IT**	**2 Aplikasi**	**9.020.000**	
			Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi	**4 Kegiatan**				**Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi**	**4 Kegiatan**		
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik				750.000.000	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik				9.020.000	
	SEMUA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				**4.177.200.000**	**SEMUA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**4.290.108.807**	
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**4.177.200.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**4.290.108.807**	
	a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun**	**8 Dokumen**	**36.500.000**	**a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun**	**8 Dokumen**	**42.060.000**	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun	**5 Dokumen**				**Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun**	**5 Dokumen**		
	1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				10.000.000	1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				22.000.000	
	2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				15.000.000	2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				8.060.000	
	3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				8.000.000	3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				-	
	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.000.000	

	b.	**Administrasi Keuangan**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**	**12 Bulan**	**2.760.700.000**	**b.**	**Administrasi Keuangan**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**	**12 Bulan**	**2.750.049.807**	
				Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran	**6 Dokumen**					**Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran**	**6 Dokumen**		
				Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran	**4 Laporan**					**Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran**	**4 Laporan**		
				Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	**1 Laporan**					**Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**	**1 Laporan**		
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.750.000.000		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.735.966.807	
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.500.000		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8.250.000	
		3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran				2.500.000		3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran				1.225.000	
		4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				5.700.000		4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				4.608.000	
	c.	**Administrasi Umum**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana**	**21 Sub Kegiatan**	**1.194.000.000**	**c.**	**Administrasi Umum**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana**	**21 Sub Kegiatan**	**1.361.999.000**	
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.500.000		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.380.000	
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	
		4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				2.500.000		4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				19.800.000	
		5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				135.000.000		5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				2.250.000	
		6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				18.500.000		6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				136.000.000	
		7. Penyediaan Alat Tulis Kantor				150.000.000		7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				18.199.000	

	8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				120.000.000	8. Penyediaan Alat Tulis Kantor				112.960.000	
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000	9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				90.640.000	
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000	10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000	
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman				125.000.000	11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.500.000	
	12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah				250.000.000	12. Penyediaan Makanan dan Minuman				291.000.000	
	13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				50.000.000	13. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah				217.520.000	
	14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				30.000.000	14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				-	
	15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				45.000.000	15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				27.300.000	
	16. Pengadaan Mebeleur				50.000.000	16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				40.000.000	
	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				60.000.000	17. Pengadaan Mebeleur				75.250.000	
	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				31.000.000	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				60.000.000	
	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				5.000.000	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				30.200.000	
	20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				7.000.000	20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				4.000.000	
	21. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor				50.000.000	21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				10.000.000	

	d.	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian**	**100%**	**186.000.000**		22. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor				170.000.000	
				Persentase Aparatur Yang Meningkat Kecakapan dan Ketrampilannya	**100%**		**d.**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian**	**100%**	**136.000.000**	
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				36.000.000				**Persentase Aparatur Yang Meningkat Kecakapan dan Ketrampilannya**	**100%**		
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				150.000.000		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				36.000.000	
								2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100.000.000	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang tidak ada usulan dari pelayanan provinsi ,LSM dan asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah provinsi serta usulan Musrenbang kabupaten/kota.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PINRANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam peningkatan daya saing nasional melalui implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara Nasional serta pelaksanaan Misi pertama RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yakni mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif dan Misi Ketiga Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif. Penjelesan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi Inovatif dan Inklusif. Penjelasan Misi Ketiga yaitu Mengembangkan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah. Sehingga Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pen gusaha regional, nasional, dan internasional serta upaya peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah.

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati

kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rumusan misi RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) uraiannya sebagai berikut :

1. **Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi**.

   Misi ini mencakup upaya pokok ***mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).***

   a) Tujuan

      1. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau *electronic governance (e-governance).*

      2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik

      3. Menyederhanakan prosedur,mempersingkat waktu dan transparansi proses perizinan investasi

      4. Mengoptimalkan kinerja dan efektifitas PTSP

   b) Sasaran

      1) Meningkatnya penyelenggaraan perizinan dan non perizinan

      2) Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik

      3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

      4) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

2. **Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.**

Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, ***pengembangan investasi yang atraktif,***penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.

a) Tujuan
   1) Menciptakan iklim investasi yang kondusifdi daerah melalui tata kelola investasi dan kualitas SDM
   2) Meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi
   3) Mengembangkan daya tarik investasi
   4) Menyelenggarakan kegiatan investasi yang inovatif dan atraktif

b) Sasaran
   1) Meningkatnya tata kelola investasi dan kualitas SDM
   2) Meningkatnya minat investor berinvestasi

Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta satu lini dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang. Adapun Tujuan Dan Sasaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Pinrang Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kerja 2021
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai LKjIP	Indeks : 73
		Meningkatnya aspek legalitas obyek usaha dan Non usaha	Persentase Wira Usaha Yang Memanfaatkan Layanan Perizinan	- Perizinan Usaha 90,75% - Perizinan Non Usaha 82%
			Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	- Perizinan Usaha 2500 - Perizinan Non Usaha 1420
			Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM) perizinan	84
2.	Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah) dan Penanaman Modal Asing (PMA – US$)	- PMDN: 1.105.632.540.000 - PMA: $ 54.230.040
		Meningkatnya penanaman modal	Jumlah Proyek PMDN	1504
			Jumlah Proyek PMA	3

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Kegiatan

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan

a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan

1.1.2 Sub Kegiatan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
d. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. Administrasi Umum

1.1.3 Sub Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
m. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
n. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
o. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
p. Pengadaan Mebeleur
q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
u. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya

1.1.4 Sub Kegiatan

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2.1 Kegiatan

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan

a. Penetapan Kebijakan Daerah MengenaiPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.1.2 Sub Kegiatan

a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

3.1 Kegiatan

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

3.1.1 Sub Kegiatan

a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

4.1 Kegiatan

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

4.1.1 Sub Kegiatan

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan PengelolaanPengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1 Kegiatan

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.1 Kegiatan

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Sub Kegiatan

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik

Rekapitulasi dari uraian diatas adalah ada 6 (Enam) Program,10 (Sepuluh) Kegiatan, 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan. Serta kebutuhan Dana/Pagu indikatif sebesar Rp 5.235.966.807 dan sumber pendanaannya APBD II.

Tabel T-C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022

Provinsi Sulewesi Selatan Kabupaten Pinrang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Lembar ..... Dari .....

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.235.966.807**				**5.477.500.000**
2	18				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**945.858.000**				**1.043.000.000**
2	18	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**184.800.000**				**200.000.000**
2	18	02	01		**a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang Investasi**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**3 Investor**	**184.800.000**			**3 Investor**	**200.000.000**
2	18	02	01	01	1. Penetapan Kebijakan Daerah MengenaiPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				184.800.000				200.000.000
2	18	02	02		**b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tersedianya peta potensi unggulan daerah**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**1 peta**	**0**			**1 peta**	**0**
2	18	02	02	02	1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				0				0
2	18	03			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**144.478.000**				**168.000.000**
2	18	03	01		**a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terselenggaranya Pameran Investasi**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**4 Pameran**	**144.478.000**			**4 Pameran**	**168.000.000**
2	18	03	01	01	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				17.000.000				18.000.000
2	18	03	01	02	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				127.478.000				150.000.000

2	18	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**521.000.000**				**572.000.000**
2	18	04	01		**a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah informasi layanan perizinan**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**3 Informasi Layanan**	**521.000.000**			**3 Informasi Layanan**	**572.000.000**
2	18	04	01	01	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				140.000.000				150.000.000
2	18	04	01	02	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal				102.000.000				106.000.000
2	18	04	01	03	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan PengelolaanPengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan				12.000.000				16.000.000
2	18	04	01	04	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				267.000.000				300.000.000
2	18	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**86.560.000**				**92.000.000**
2	18	05	01		**a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan SKM dan LKPM**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**2 Laporan**	**86.560.000**			**2 Laporan**	**92.000.000**
2	18	05	01	01	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				37.960.000				40.000.000
2	18	05	01	02	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				40.100.000				42.000.000
2	18	05	01	03	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				8.500.000				10.000.000

2	18	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**9.020.000**				**11.000.000**
2	18	06	01		**a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah aplikasi berbasis IT** **Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**2 Aplikasi** **4 Kegiatan**	**9.020.000**			**2 Aplikasi** **4 Kegiatan**	**11.000.000**
2	18	06	01	01	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik				9.020.000				11.000.000
x	xx				**SEMUA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**4.290.108.807**				**4.434.500.000**
x	xx	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**4.290.108.807**				**4.434.500.000**
x	xx	01	01		**a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun** **Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**8 Dokumen** **5 Dokumen**	**42.060.000**			**8 Dokumen** **5 Dokumen**	**42.000.000**
x	xx	01	01	01	1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				22.000.000				20.000.000
x	xx	01	01	02	2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				8.060.000				9.000.000
x	xx	01	01	03	3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				0				0
x	xx	01	01	05	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.000.000				13.000.000
x	xx	01	02		**b. Administrasi Keuangan**	**Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan** **Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran** **Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran** **Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**12 Bulan** **6 Dokumen** **4 Laporan** **1 Laporan**	**2.750.049.807**			**12 Bulan** **6 Dokumen** **4 Laporan** **1 Laporan**	**2.815.500.000**
x	xx	01	02	01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.735.966.807				2.800.000.000

x	xx	01	02	02		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8.250.000				8.500.000
x	xx	01	02	07		3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran				1.225.000				2.000.000
x	xx	01	02	09		4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				4.608.000				5.000.000
x	xx	01	03		**c.**	**Administrasi Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**21 Sub Kegiatan**	**1.361.999.000**			**21 Sub Kegiatan**	**1.420.000.000**
x	xx	01	03	01		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0				0
x	xx	01	03	02		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.380.000				34.000.000
x	xx	01	03	03		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0				0
x	xx	01	03	05		4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				19.800.000				20.000.000
x	xx	01	03	06		5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				2.250.000				2.300.000
x	xx	01	03	07		6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				136.000.000				140.000.000
x	xx	01	03	08		7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				18.199.000				18.200.000
x	xx	01	03	10		8. Penyediaan Alat Tulis Kantor				112.960.000				114.000.000
x	xx	01	03	11		9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				90.640.000				110.000.000
x	xx	01	03	12		10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000				6.000.000
x	xx	01	03	13		11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.500.000				17.000.000
x	xx	01	03	17		12. Penyediaan Makanan dan Minuman				291.000.000				292.000.000
x	xx	01	03	18		13. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah				217.520.000				230.000.000
x	xx	01	03	20		14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				0				0
x	xx	01	03	22		15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				27.300.000				28.000.000

x	xx	01	03	24		16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				40.000.000				41.000.000
x	xx	01	03	25		17. Pengadaan Mebeleur				75.250.000				75.500.000
x	xx	01	03	28		18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				60.000.000				65.000.000
x	xx	01	03	30		19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				30.200.000				31.000.000
x	xx	01	03	32		20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				4.000.000				5.000.000
x	xx	01	03	34		21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				10.000.000				11.000.000
x	xx	01	03	38		22. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			**100%**	170.000.000				180.000.000
x	xx	01	04		**d.**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian** **Persentase Aparatur Yang Meningkat Kecakapan dan Ketrampilannya**	**Kecamatan Watang Sawitto**	**100%**	**136.000.000**			**100%** **100%**	**157.000.000**
x	xx	01	04	02		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				36.000.000				37.000.000
x	xx	01	04	11		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100.000.000				120.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4.
Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	**Pendanaan Indikatif Tahun 2021**
SEMUA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN		4.290.108.807
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai Survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan kantor**	4.290.108.807
1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu**	42.060.000
a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	22.000.000
b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	8.060.000
c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan kegiatan Dinas yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	-
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja yang dievaluasi	12.000.000
2. Administrasi Keuangan	**Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu**	2.760.700.000
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran Gaji dan tunjangan ASN yang dibayrakan secara tepat waktu	2.735.966.807

b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		8.250.000
c.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/smeserteran yang tersusun dan dilaporkan tepat waktu	1.225.000
d.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun dan dilaorkan tepat waktu	4.608.000
3.	**Administrasi Umum**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien**	1.361.999.000
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang terbayarkan tepat waktu	-
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bangunan pemerintah yang fasilitas komunikasi sumber daya air dan listriknya tersedia secara optimal	35.380.000
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-
d.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang tebayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	19.800.000
d.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.250.000
e.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	136.000.000
f.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	18.199.000
g.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia yang sesuai dengan analisa kebutuhan	112.960.000
h.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia sesuai dengan analisa kebutuhan	90.640.000
i.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai analisa kebutuhan	5.000.000

j.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	16.500.000
k.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum seusia analisa kebutuhan	291.000.000
l.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	217.520.000
m.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional	-
n.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	27.300.000
o.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	40.000.000
p.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	75.250.000
q.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	60.000.000
r.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Kendaraan Dinas / Operasional dalam Kondisi Baik	30.200.000
s.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	4.000.000
t.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	10.000.000
u	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat sesuai analisa kebutuhan	170.000.000
4.	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**		136.000.000
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kerja batik pegawai dan pakaian olah raga	36.000.000

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	100.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		945.858.000
II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Meningkatnya Iklim Penanaman modal yang kondusif**	184.800.000
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota	**-**	184.800.000
a. Penetapan Kebijakan Daerah MengenaiPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Pen.Modal	Penyelenggraan kegiatan peniliaian evaluasi invesment award	184.800.000
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Tersedianya Peta Potensi Investasi Penanaman Modal**	-
a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Invetasi Penanaman Modal	-
III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Meningkatnya kerjasama investasi penanaman modal**	144.478.000
	Meningkatnya informasi dan strategi investasi penanaman modal	
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase nilai dan realisasi investasi**	144.478.000
	Jumlah Pameran Investasi dalam provinsi dan luar provinsi	
a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Forum Investasi Pinrang (FIP)	17.000.000

b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi penanaman modal melalui informasi media elektronik, brosur dan buku profil investasi	127.478.000
IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu**	521.000.000
	Persentase Layanan Perizinan dan Non perizinan yang berbasis teknologi informasi komunikasi	
	Persentase penerapan sistem Manajemen Mutu Pelayanan Prima	
1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Online yang terintegrasi**	521.000.000
	Peyusunan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Peningkatan Serapan realisasi target perizinan dan non perizinan	
	Peningkatan sarana prasarana perizinan OSS	
a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	140.000.000
	Terpenuhinya kebutuhan media informasi publik	
	Standar Operasional Prosedur Online dan Standar Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana OSS	

b.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Tersedianya pedoman dan acuan pelaksanaan penerbitan perizinan dan non perizinan	102.000.000
		Meningkatnya kepuasan pelanggan	
		Terlaksananya kegiatan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan	
c.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan PengelolaanPengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatnya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	12.000.000
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		267.000.000
V.	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi PMDN dan PMA**	86.560.000
		Persentase SKM	
1.	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya pelaksanaan pengendalian,pemantauan dan pengawasan Investasi Penanaman Modal**	86.560.000
		Terlaksanya aplikasi SKM Online	
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Ranperda /Ranperbub kebijakan PM	37.960.000
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan PM dan laporan SKM	40.100.000
c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi dan monitring tim Satgas	8.500.000

VI.	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Pengembangan Sistem Data dan Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan**	9.020.000
1.	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan data perizinan dan non perizinan melalui Sistem Informasi Perizinan Online yang terintegrasi**	9.020.000
a.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik	Updating dan pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Perizinan	9.020.000
		Peningkatan pemeliharaan Server	
		Persentase laporan perizinan dan non perizinan	
		Tersedianya sistem informasi data perizinan yang dapat diakses masyarakat	

Dari uraian tabel rencana kerja program dan kegiatan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2021 adalah untuk urusan rutin sebesar **Rp. 4.290.108.807** dan urusan Penanaman Modal Rp**. 945.858.000** sehingga total anggaran **Rp. 5.235.966.807** *(Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah).*

BAB V
P E N U T U P

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pinrang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2021.

RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTahun 2021 ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang. Setiap bagian dan bidang agar segera menyusun langkah-langkah persiapan pelaksanaannya sehingga RENJA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 ini dapat diwujudkan secara optimal.

5.2 Kaidah –Kaidah Pelaksanaan

a. Renja Dinas PMPTSP merupakan rencana tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Tahun 2019-2024.
b. Kepala Dinas PMPTSP berkewajiban melakukan evaluasi dan memonitoring setiap bagian dan bidang dalam menyusun Renja SKPD Dinas PMPTSP sesuia tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMPTSP.
c. Dinas PMPTSP berkewajiban mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih sesuai tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024.
d. Merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
e. Setiap bagian dan bidang dalam menyusun program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hasil pelaksanaan kegiatannya mampu memberikan

hasil (outcome) yang optimal yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengguna layanan / investasi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas PMPTSP dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Pinrang dalam mencapai tujuan sasaran program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 maka Dinas PMPTSP telah dan akan melanjutkan beberapa program unggulan yang inovatif dalam peningkatan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Pinrang yaitu :

- **SIAP BOSS** (Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis OSS) yang merupakan system pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan usaha dan non usaha dan telah dilengkapi dengan penandatangan elektronik.
- **RAJIN** (Gerai Perizinan) yang merupakan aplikasi perizinan di Tingkat Desa dan Kelurahan terintegrasi dengan System Informasi Perizinan (SIP) DPMPTSP Kabupaten Pinrang.
- **KONGSI** (Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi) Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang merupakan suatu instrumen yang memudahkan praktik kerjasama antar masyarakat dengan pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan dan mengembangkan investasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **PIF** (Pinrang Invesment Forum) merupakan Forum Investasi yang diadakan dalam rangka menarik minat investor PMDN dan PMA.
- Melakukan evaluasi dan memonitoring pelaksanaan program dan kegiatan disetiap bidang dan bagian, serta peningkatan sarana dan prasarana.

Pinrang, November 2020

Kepala DPMPTSP Kab.Pinrang

ANDI MIRANI,.AP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 19740603 199311 2 001